

ABSTRAK

Pada tanggal 11 November 2019, media-media internasional mengabarkan bahwa Gambia mengajukan tuntutan terhadap Myanmar ke Mahkamah Internasional. Tuntutan tersebut secara garis besar berisi tentang dugaan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dan bahwa Myanmar telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida 1948, serta dorongan untuk sesegeramungkin memberikan pengakuan dan mengeluarkan tindakan sementara. Sudah sejak lama etnis Rohingya menghadapi diskriminasi di Myanmar, khususnya sejak adanya kudeta militer pada 1962. Hingga sekarang, etnis Rohingya masih menghadapi diskriminasi di Myanmar baik oleh pemerintah maupun etnis lainnya yang menyebabkan timbulnya berbagai pelanggaran HAM berat serta eksodus besar-besaran yang dilakukan oleh etnis Rohingya ke negara-negara tetangga. Langkah yang diambil oleh Gambia merupakan langkah menarik sekaligus tidak biasa yang dilakukan oleh sebuah negara dikancah perpolitikan global dewasa ini. Secara geopolitik, Gambia tidak memiliki kepentingan apapun baik dengan Myanmar maupun etnis Rohingya sendiri. Kedua negara terletak di benua berbeda dan dipisahkan dengan bentang jarak sejauh kurang lebih 12.000 kilometer. Gambia juga bukan negara yang memiliki hak istimewa di dewan keamanan PBB. Yang menarik disini adalah Gambia tidak mendapatkan dampak secara langsung dari upaya genosida yang dilakukan oleh otoritas Myanmar terhadap warga etnis Rohingya. Respons Gambia sekaligus menjadi harapan baru dalam upaya mencari akuntabilitas Myanmar ditengah diamnya komunitas internasional terhadap kasus ini.

Penelitian ini meninjau konstruksi media dalam memotret Kebijakan Luar Negeri Gambia dengan mempertimbangkan konsep media melalui fungsi informasi. Informasi yang didapat melalui media kemudian dijadikan sebagai basis data dalam meninjau kebijakan luar negeri tersebut. Maka dari itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konstruktivisme sosial dan teori identitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu melalui metode studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan uji validitas data menggunakan uji kredibilitas dengan cara meningkatkan ketekunan dan konfirmasi. Penelitian ini menemukan bahwa media memotret Gambia sebagai negara yang aktif dan proaktif dalam mengecam segala bentuk tindakan genosida yang terjadi pada etnis Rohingya, advokat HAM di kancah internasional, serta komitmen solidaritasnya terhadap sesama muslim.

KATA KUNCI: Media, Kebijakan Luar Negeri, Konstruktivisme Sosial, Identitas.

ABSTRACT

On November 11, 2019, Gambia filed a lawsuit against Myanmar at the International Court of Justice (ICJ). The lawsuit broadly alleges that Myanmar has committed genocide against the Rohingya ethnic group and has violated the 1948 Genocide Convention, urging for prompt recognition and interim measures. The Rohingya have long faced discrimination in Myanmar, particularly since the military coup in 1962. To this day, they continue to endure discrimination from both the government and other ethnic groups, resulting in severe human rights violations and large-scale exoduses to neighboring countries. Gambia's move is both intriguing and unusual for a nation on the global political stage today. Geopolitically, Gambia has no direct interests in Myanmar or the Rohingya ethnic group. The two countries are located on different continents and are separated by approximately 12,000 kilometers. Gambia also does not hold any privileged position in the UN Security Council. What makes this situation interesting is that Gambia is not directly impacted by Myanmar's genocidal efforts against the Rohingya population. Gambia's response represents a new hope for accountability amid the international community's silence on this issue.

This study examines how the media constructs portrayals of Gambia's foreign policy, with a focus on the concept of media as an information source. Information gathered through the media serves as a basis for reviewing the country's foreign policy. To analyze this, the study employs a social constructivist approach and identity theory. The data collection method used in this thesis is literature review, with secondary data as the primary source. To ensure data validity, credibility is tested through methods of persistence and confirmability. The study finds that the media portrays Gambia as an active and proactive nation in condemning all forms of genocide, particularly in relation to the Rohingya ethnic group. It also highlights Gambia's role as a human rights advocate in the international arena and its commitment to solidarity with fellow Muslims.

KEYWORDS; Media, Foreign Policy, Social Constructivism, Identity.